



KONSTRUKSI KEAMANAN KOREA UTARA MELALUI IDEOLOGI JUCHE DI ERA PANDEMI GLOBAL

Faizal Kholifatu Akbar¹
Rifqi Itsnaini Yusuf²

Abstrak:

Pandemi COVID-19 menjadi momentum penting dalam memahami bagaimana Korea Utara mengonstruksi keamanan nasional melalui ideologi Juche yang berlandaskan kemandirian politik, ekonomi, dan pertahanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ideologi Juche dalam proses sekuritisasi Korea Utara di tengah krisis global, khususnya bagaimana rezim Kim Jong-un membingkai pandemi sebagai ancaman eksistensial terhadap ideologi dan kedaulatan negara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan metode Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) ala Norman Fairclough, penelitian ini menelaah pidato-pidato Kim Jong-un sebagai tindak ujaran (speech act) yang mereproduksi wacana ideologis dan melegitimasi kebijakan luar biasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ideologi Juche berfungsi sebagai *referent object* dalam sekuritisasi, di mana pandemi diposisikan bukan hanya sebagai krisis kesehatan, melainkan juga sebagai perang ideologis melawan infiltrasi asing. Melalui kontrol wacana dan propaganda negara, rezim menggunakan pandemi untuk memperkuat loyalitas rakyat, mempertahankan stabilitas politik, dan memperkokoh ketahanan rezim otoriter (*authoritarian resilience*). Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan teori sekuritisasi ke dalam konteks keamanan non-tradisional Asia Timur, dengan menegaskan bahwa ideologi dapat menjadi instrumen pertahanan sekaligus sarana legitimasi politik dalam sistem otoriter.

Kata kunci: Juche, sekuritisasi, Korea Utara, pandemi COVID-19, Analisis Wacana Kritis, ketahanan otoriter.

¹Prodi Hubungan Internasional
Universitas Peradaban
e-mail : akbarfaisal830@gmail.com

²Prodi Hubungan Internasional
Universitas Jenderal Soedirman
e-mail : rifqi.itsnaini@unsoed.ac.id

Pendahuluan

Kawasan utara Semenanjung Korea secara resmi berdiri sebagai Republik Demokratik Rakyat Korea pada 9 September 1948 dengan Kim Il Sung sebagai pemimpin yang memperoleh dukungan penuh dari Uni Soviet. Berbeda dengan Korea Selatan yang membangun sistem pemerintahan demokratis dan ekonomi berbasis perdagangan bebas, Korea Utara mengadopsi ideologi komunis dan memilih untuk menerapkan kebijakan isolasionisme (Schulten, 2023). Isolasionisme sendiri merupakan pendekatan politik luar negeri di mana suatu negara memprioritaskan kepentingan domestiknya di atas keterlibatan dalam urusan internasional.

Kebijakan isolasionisme Korea Utara berakar pada pemikiran Kim Il Sung yang kemudian diformulasikan ke dalam ideologi Juche (주체). Istilah ini diperkenalkan secara resmi melalui pidatonya berjudul *“On Eliminating Dogmatism and Formalism and Establishing Juche in Ideological Work”* pada Sidang Propaganda dan Promosi Partai Buruh Korea tanggal 28 Desember 1955. Pada awalnya, Juche difungsikan sebagai pedoman dalam pembangunan ideologis. Namun, seiring proses konsolidasi kekuasaan dan pembersihan fraksi-fraksi anti-Kim di tubuh Partai Buruh, penerapan Juche berkembang secara signifikan hingga mencakup bidang ekonomi dan pertahanan sebagai wujud nyata dari prinsip kemandirian nasional (KBS World Radio, 2020).

Perkembangan ideologi ini semakin menonjol ketika muncul konflik ideologis antara Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok akibat perbedaan pandangan mengenai revisionisme. Dalam konteks tersebut, Korea Utara menjadikan Juche sebagai landasan utama dalam perumusan arah kebijakan luar negeri yang bersifat independen. Langkah ini berjalan seiring dengan

pembentukan sistem kekuasaan tunggal serta penguatan kultus individu terhadap Kim Il Sung. Dari sinilah rezim Korea Utara mengembangkan konsep “sistem ideologi tunggal,” yakni struktur politik dan ideologis yang sepenuhnya didasarkan pada prinsip Juche, yang menegaskan kesatuan antara negara dan rakyat dalam satu kerangka ideologis yang menyeluruh (KBS World Radio, 2020).

Secara filosofis, Juche mencerminkan ambisi Kim Il Sung untuk menjadi aktor sentral dalam revolusi serta pembangunan nasional. Ideologi ini menekankan nilai-nilai kemandirian, penolakan terhadap ketergantungan asing, kepercayaan pada kemampuan serta kecerdasan bangsa sendiri, dan semangat revolusioner untuk menyelesaikan berbagai persoalan secara mandiri dengan penuh tanggung jawab dalam kondisi apapun (Lee, 2003).

Dalam konteks kebijakan nasional, Juche dijabarkan melalui tiga prinsip utama yaitu *chaju*, *charip*, dan *chawi* yang dalam studi hubungan internasional mewakili orientasi negara terhadap kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan pertahanan nasional. Prinsip *chaju* atau kemandirian politik berakar pada gagasan kedaulatan (*sovereignty*) yang menolak segala bentuk intervensi eksternal. Korea Utara menegaskan supremasi absolut atas wilayah, sistem pemerintahan, dan ideologinya sendiri, serta menolak mekanisme interdependensi global (Armstrong, 2013).

Sementara itu, *charip* atau kemandirian ekonomi diwujudkan melalui kebijakan pembangunan nasional yang menolak ketergantungan terhadap kekuatan ekonomi asing. Meskipun sistem perekonomiannya sangat tertutup, Korea Utara secara selektif memanfaatkan *special economic zones* sebagai sarana terbatas untuk memperoleh devisa dan teknologi, tanpa melepaskan kontrol negara terhadap produksi dan distribusi. Kebijakan ini memperlihatkan

upaya untuk menyeimbangkan prinsip autarki ekonomi dengan kebutuhan pragmatis dalam sistem internasional (Abrahamian & Melvin, 2015).

Adapun pilar terakhir, *chawi* atau kemandirian dalam pertahanan, menjadi dasar dari pendekatan militeristik Korea Utara yang kemudian dikenal sebagai kebijakan *Songun* atau *military-first policy*. Strategi ini sejalan dengan konsep *deterrence strategy*, di mana kekuatan militer, terutama pengembangan senjata nuklir dan sistem misil balistik, dimanfaatkan sebagai alat utama untuk menahan ancaman eksternal sekaligus menjamin kelangsungan rezim. Secara keseluruhan, ketiga pilar Juche menegaskan posisi Korea Utara sebagai negara yang menempatkan kemandirian politik, ekonomi, dan militer sebagai prioritas utama, sekaligus menempatkannya sebagai entitas unik dalam sistem internasional yang lebih mengutamakan prinsip *self-reliance* dibandingkan integrasi global (Armah & Halimah, 2024).

Kerangka Teori

Untuk menganalisis tindakan yang dilakukan Presiden Korea Utara (Kim Jong-un) dalam melakukan sekuritisasi ideologi terhadap ancaman pandemi COVID-19, digunakan pendekatan teori dari beberapa disiplin ilmu, yakni teori sekuritisasi (copenhagen school), teori *Non-Traditional Security* (NTS), serta teori Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*). Ketiga kerangka ini saling melengkapi untuk memahami bagaimana pandemi COVID-19 dikonstruksikan sebagai suatu ancaman bagi ideologi Juche.

A. Teori Sekuritisasi (Copenhagen School)

Konsep sekuritisasi dipahami sebagai suatu proses sosial di mana sebuah isu dikonstruksikan dan dipersepsikan sebagai ancaman eksistensial terhadap suatu objek acuan (*referent object*). Melalui proses ini, aktor keamanan memperoleh legitimasi untuk mengambil tindakan luar biasa yang

berada di luar mekanisme politik konvensional guna menanggulangi ancaman tersebut (Caballero-Anthony et al., 2016). Adapun *referent object* mengacu pada entitas yang dianggap berada dalam situasi terancam dan, karenanya, memerlukan perlindungan melalui kebijakan khusus di luar prosedur normal (Buzan et al., 1998).

Dalam kerangka teori sekuritisasi, terdapat tiga elemen utama yang menjadi dasar analisis, yakni

1. aktor sekuritisasi (*securitizing actor*)
2. objek referensi (*referent object*)
3. tindakan ujaran (*speech act*).

Aktor sekuritisasi merupakan pihak yang memiliki legitimasi sosial maupun politik untuk menyatakan bahwa suatu isu tertentu merupakan ancaman eksistensial bagi entitas yang dilindungi. Menurut Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde (1998), dalam sistem politik demokratis, aktor ini dapat berupa kepala negara, lembaga legislatif, maupun media massa yang memperoleh otoritas melalui mekanisme partisipasi publik. Sebaliknya, dalam sistem otoriter seperti Korea Utara, peran tersebut terpusat pada figur pemimpin, yakni Kim Jong Un, serta institusi ideologis seperti Partai Buruh Korea, yang memegang kendali penuh atas konstruksi wacana ancaman dan penetapan narasi resmi negara (Buzan et al., 1998).

Komponen kedua adalah objek referensi, yaitu entitas yang dikonstruksikan sebagai sesuatu yang harus dilindungi. Buzan (1983) melalui karyanya *People, States and Fear* memperluas makna keamanan tidak hanya mencakup aspek material seperti wilayah dan militer, tetapi juga aspek non-material, seperti identitas nasional, budaya, hingga ideologi (Buzan, 1983). Dalam konteks penelitian ini, ideologi Juche diposisikan sebagai objek

referensi yang dianggap esensial bagi keberlangsungan eksistensi negara Korea Utara. Pandemi COVID-19, sebagaimana dikonstruksikan dalam narasi resmi negara, tidak sekadar dipandang sebagai ancaman kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai ancaman ideologis yang berpotensi melemahkan fondasi nilai Juche apabila tidak segera dikendalikan. Oleh sebab itu, upaya melindungi ideologi menjadi pusat dari strategi sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor negara.

Elemen ketiga adalah *speech act*, yakni pernyataan atau tindakan ujaran yang secara eksplisit membingkai suatu isu sebagai ancaman eksistensial, sehingga membenarkan pengambilan langkah-langkah luar biasa di luar prosedur politik normal. Konsep ini berakar pada teori linguistik J. L. Austin (1962), yang menegaskan bahwa ujaran tidak hanya berfungsi mendeskripsikan realitas, melainkan juga memiliki daya untuk menciptakan realitas (Austin, 1962). Ole Wæver kemudian mengadaptasikan gagasan tersebut ke dalam studi keamanan dengan menjelaskan bahwa “keamanan” merupakan konstruksi sosial yang terbentuk melalui ujaran yang diyakini kebenarannya oleh audiens (Wæver, 1995). Dalam konteks Korea Utara, *speech act* tidak muncul dalam ruang diskusi terbuka, melainkan dikontrol secara ketat melalui media negara dan pidato resmi pemimpin yang terpusat pada satu sumber. Dengan dominasi penuh terhadap komunikasi politik ini, rezim mampu membingkai pandemi sebagai ancaman terhadap ideologi nasional dan memanfaatkan wacana tersebut untuk melegitimasi tindakan isolasionis serta kebijakan represif.

B. Teori *Non-Traditional Security* (NTS)

Isu keamanan non-tradisional mencakup berbagai bentuk ancaman terhadap keberlangsungan hidup serta kesejahteraan masyarakat dan negara yang bersumber dari faktor-faktor non-militer. Ancaman tersebut dapat berupa

perubahan iklim, degradasi lingkungan, kelangkaan sumber daya alam, penyebaran penyakit menular, bencana alam, arus migrasi tidak teratur, krisis pangan, perdagangan manusia, peredaran narkotika, hingga kejahatan lintas negara (Caballero-Anthony et al., 2016). Berbeda dengan konsep keamanan yang dikemukakan oleh Buzan, yang menitikberatkan analisis pada ancaman militer dan keamanan negara, pendekatan keamanan non-tradisional menyoroti risiko-risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan kemanusiaan di luar ranah militer.

Dalam konteks ini, Kim Jong-un menggunakan *speech act* sebagai cara untuk menjadikan isu keamanan non-tradisional sebagai isu keamanan tradisional. Dengan menggunakan teori NTS, hasil analisis yang didapat adalah pandemi COVID-19 dikonstruksi sebagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan ideologis dan eksistensial terhadap kedaulatan nasional berbasis prinsip Juche.

C. Teori *Critical Discourse Analysis* (CDA)

Pendekatan Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) sebagaimana dirumuskan oleh Norman Fairclough berangkat dari pandangan bahwa wacana tidak sekadar merepresentasikan realitas sosial, melainkan turut membentuk dan dibentuk oleh relasi kekuasaan, ideologi, serta struktur sosial yang melingkupinya (Fairclough, 1995). Penggunaan CDA dalam penelitian ini dipertimbangkan karena relevan dengan tujuan analisis, yaitu menelaah bagaimana pidato Kim Jong-un terkait pandemi COVID-19 dikonstruksi sebagai praktik kebahasaan yang sarat dengan muatan ideologis, serta berfungsi sebagai sarana dalam proses sekuritisasi.

D. Konsep Sekuritisasi Ideologi

Copenhagen School yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde memusatkan perhatian pada bagaimana suatu isu (baik di bidang militer, politik, maupun ekonomi) dikonstruksikan sebagai ancaman eksistensial melalui tindak tutur (*speech act*) yang kemudian berfungsi untuk melegitimasi tindakan luar biasa di luar mekanisme politik konvensional (Buzan et al., 1998). Namun, dalam pengembangannya, konsep ini mengalami perluasan melalui kontribusi Ralf Emmers yang mengadaptasi teori keamanan Copenhagen School serta Mely Caballero-Anthony melalui pendekatan keamanan non-tradisional. Dengan integrasi kedua perspektif tersebut, sekuritisasi tidak lagi terbatas pada isu-isu militer semata, melainkan juga mencakup dimensi ideologi, identitas, serta nilai-nilai sosial yang berpotensi mengancam keberlangsungan suatu entitas politik maupun masyarakat.

Dalam kerangka ideologi Juche, Korea Utara secara tegas mengintegrasikan elemen-elemen keamanan tradisional dan non-tradisional guna mempertahankan kelangsungan rezim serta kedaulatan negara. Aspek keamanan tradisional, yang berfokus pada kekuatan pertahanan dan perlindungan teritorial dari ancaman eksternal, tercermin melalui prinsip chawi (kemandirian dalam pertahanan) dan pengembangan kemampuan nuklir sebagai strategi penangkal terhadap tekanan maupun ancaman dari negara-negara Barat (Dhawan, 2024). Sementara itu, dimensi keamanan non-tradisional yang mencakup bidang kesehatan, ekonomi, dan ideologi diartikulasikan melalui pilar chaju dan charip, yang menekankan pentingnya kemandirian politik serta swasembada ekonomi sebagai bentuk respons terhadap dinamika global, termasuk krisis seperti pandemi (K.-A. Park, 2013). Dalam konteks tersebut, pandemi COVID-19 tidak semata dipersepsikan

sebagai ancaman kesehatan masyarakat, melainkan juga sebagai ancaman terhadap keberlangsungan sistem ideologi nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif-deskriptif, yang dipilih karena sejalan dengan tujuan penelitian untuk menelaah secara mendalam dinamika sosial-politik, khususnya terkait peran ideologi Juche dalam proses sekuritisasi Korea Utara selama pandemi COVID-19. Pendekatan kualitatif menitikberatkan pada upaya interpretatif dalam memahami makna, konstruksi sosial, serta konteks yang melatarbelakangi suatu fenomena, alih-alih berfokus pada data kuantitatif atau pengukuran statistik (Neuman, 2014).

Hasil dan Pembahasan

A. Ideologi Juche sebagai Dasar Sekuritisasi Nasional

Dalam sistem politik Korea Utara, ideologi Juche berfungsi sebagai fondasi konseptual yang memadukan aspek politik, ekonomi, dan pertahanan ke dalam satu kesatuan ideologis yang utuh. Ideologi ini tumbuh dari konteks historis kolonialisme Jepang dan Perang Dingin, ketika negara membutuhkan legitimasi ideologis untuk menegaskan kedaulatan dan menolak dominasi eksternal. Melalui narasi kemandirian total, Juche menjadi simbol perlawanan terhadap hegemoni global dan alat untuk memperkuat loyalitas terhadap kepemimpinan tunggal (Armstrong, 2003).

Juche memiliki tiga pilar utama yaitu chaju (kemandirian politik), charip (kemandirian ekonomi), dan chawi (kemandirian pertahanan) yang menjadi dasar bagi konstruksi keamanan nasional. Pilar chaju menegaskan pentingnya kedaulatan politik dan penolakan terhadap intervensi asing, sementara charip menekankan swasembada ekonomi sebagai bentuk ketahanan domestik. Adapun chawi menegaskan kemandirian dalam

pertahanan, yang diwujudkan melalui kebijakan *Songun* atau *military-first policy* sebagai strategi deterensi terhadap tekanan eksternal (Armstrong, 2003).

Ketiga pilar ini saling melengkapi dan berperan sebagai kerangka ideologis yang menjustifikasi kebijakan luar biasa atas nama keamanan nasional. Dalam konteks pandemi COVID-19, struktur ini memungkinkan pemerintah untuk menafsirkan krisis kesehatan global sebagai ancaman terhadap integritas ideologi *Juche* (Caballero-Anthony et al., 2016). Pandemi diperlakukan bukan hanya sebagai peristiwa medis, tetapi sebagai ujian terhadap ketahanan ideologi nasional dan kemandirian rezim.

Dengan demikian, *Juche* berfungsi sebagai *securitizing framework* yaitu kerangka ideologis yang mendefinisikan ancaman, membentuk persepsi publik, dan mengarahkan kebijakan negara. Dalam logika ini, keamanan tidak semata berarti perlindungan militer, tetapi juga mencakup perlindungan ideologis, moral, dan sosial dari pengaruh eksternal. Hal ini menegaskan bahwa *Juche* merupakan pusat dari seluruh proses sekuritisasi Korea Utara (Armstrong, 2003).

B. Ideologi *Juche* sebagai Objek Referensi (Referent Object)

Dalam kerangka teori sekuritisasi yang dikemukakan oleh Buzan, Wæver, dan de Wilde (1998), *referent object* dipahami sebagai entitas yang dikonstruksikan sebagai sesuatu yang perlu diamankan dari ancaman eksistensial. Dalam konteks Korea Utara, ideologi *Juche* berfungsi sebagai *referent object* utama yang menjadi inti dari eksistensi negara serta sumber legitimasi politik rezim. Ideologi ini tidak hanya merepresentasikan identitas nasional, tetapi juga bertindak sebagai elemen kultural dan ideologis yang menjadi fondasi bagi seluruh aspek kehidupan bernegara (Armstrong, 2003).

Pemerintah Korea Utara menempatkan Juche sebagai simbol kemandirian dan ketahanan nasional yang harus dijaga dari segala bentuk infiltrasi asing, pengaruh ideologi eksternal, maupun potensi krisis domestik. Dalam konteks pandemi COVID-19, narasi resmi negara menempatkan penyebaran virus tidak sekadar sebagai ancaman terhadap kesehatan publik, melainkan juga sebagai ancaman terhadap stabilitas ideologi Juche. Hal ini tampak dari retorika Kim Jong-un yang menggambarkan pandemi sebagai bentuk “agresi asing” yang berpotensi melemahkan moral, disiplin, serta kesetiaan ideologis rakyat terhadap negara (KCNA Watch, 2022).

Dengan meringkai pandemi sebagai ancaman ideologis, rezim memperoleh legitimasi untuk mengambil langkah-langkah luar biasa di luar prosedur politik normal, seperti penutupan total perbatasan, pengendalian ketat mobilitas warga, serta peningkatan kontrol terhadap arus informasi. Kebijakan-kebijakan tersebut dihadirkan sebagai bentuk perlindungan terhadap “kemurnian ideologi nasional,” yang dipersepsikan sebagai syarat mutlak bagi kelangsungan negara dan kepemimpinan Kim Jong-un (North Korea Chronology, 2017, p. 26).

Dengan demikian, Juche tidak hanya berperan sebagai doktrin politik, tetapi juga sebagai objek sekuritisasi yang memungkinkan negara menjustifikasi tindakan represif dan isolasionis. Dalam perspektif ini, perlindungan terhadap ideologi menjadi identik dengan perlindungan terhadap negara itu sendiri, sebuah logika khas sistem otoriter di mana keamanan ideologis menjadi instrumen utama dalam mempertahankan stabilitas politik dan legitimasi kekuasaan (Myers, 2011).

C. Diskursus Sekuritisasi Pandemi COVID-19 dalam Pidato Kim Jong-un

Proses sekuritisasi di Korea Utara selama pandemi COVID-19 sangat bergantung pada praktik wacana politik Kim Jong-un. Dengan menggunakan perspektif Analisis Wacana Kritis (CDA) yang dikembangkan oleh Fairclough, pidato-pidato Kim dapat dipahami sebagai instrumen linguistik untuk menciptakan realitas politik tertentu. Dalam konteks ini, bahasa menjadi alat kekuasaan dan sarana untuk membingkai pandemi sebagai ancaman eksistensial yang menuntut tindakan luar biasa di luar prosedur normal (Fairclough, 1995).

Tabel Analisis Wacana Kritis Pidato Kim Jong-un

No	Pidato	Dimensi Teks	Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosial
1	Victory through Socialism & Unity	Kata kunci: <i>great victory, unity, superiority</i> . Predikasi: rakyat = bersatu, sistem = unggul. Speech act: assertive + declarative.	Diproduksi KCNA pasca krisis; berfungsi menutup narasi pandemi; sirkulasi tunggal.	Pandemi = ujian ideologi; kemenangan diukur dari kesetiaan pada sosialisme; memperkuat legitimasi rezim.
2	Vaccine = Ideology	Metafora: <i>vaccine=ideology</i> . Kata kunci: <i>ideological consciousness, own strength</i> . Speech act: assertive.	Disampaikan saat dunia mendesak vaksinasi; media negara menekankan self-reliance; konsumsi internal.	Pandemi → justifikasi autarki; menolak vaksin asing; Juche diposisikan lebih tinggi dari sains medis.

3	Pandemic as War of Infiltration	<p>Metafora militeristik: <i>war</i>, <i>infiltration</i>.</p> <p>Predikasi: Rakyat & ideologi = korban; musuh=virus/asing.</p> <p>Speech act: declarative + directive implisit.</p>	<p>Diproduksi saat pandemi aktif; digunakan untuk mobilisasi rakyat; disebarkan KCNA sebagai propaganda perang.</p>	<p>Pandemi → ancaman eksistensial; memberi justifikasi kontrol sosial & pengawasan; memperkuat repressi otoriter.</p>
---	---------------------------------	--	---	---

a. Victory through Socialism and Unity

Dalam pidato berjudul “Victory through Socialism and Unity”, Kim Jong-un menyatakan, **“We have achieved the great victory in the emergency anti-epidemic campaign by virtue of our people’s single-minded unity and the superiority of our socialist system”** (KCNA Watch, 2022). Pernyataan ini menonjolkan penggunaan diksi *great victory*, *single-minded unity*, dan *superiority* sebagai strategi linguistik yang menempatkan rakyat sebagai entitas bersatu di bawah kepemimpinan tunggal dan menegaskan sistem sosialis sebagai struktur yang unggul. Secara pragmatik, ujaran tersebut dapat dikategorikan sebagai *assertive* sekaligus *declarative speech act*, karena tidak hanya menyampaikan klaim kebenaran, tetapi juga mendeklarasikan berakhirnya pandemi sebagai kemenangan ideologis.

Pada level praktik wacana, pidato ini dipublikasikan secara luas melalui Korean Central News Agency (KCNA) dan surat kabar resmi Rodong Sinmun. Penyebaran informasi secara satu arah tanpa ruang kritik memperlihatkan monopoli rezim terhadap narasi pandemi. Pada tingkat praktik sosial, deklarasi kemenangan tidak didasarkan pada indikator medis, melainkan pada tingkat kesetiaan ideologis rakyat terhadap negara. Dengan demikian,

pidato ini menggambarkan bagaimana pilar chaju (kemandirian politik) dioperasionalkan untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan Kim Jong-un serta membingkai pandemi sebagai ujian terhadap loyalitas ideologi Juche (KCNA Watch, 2022).

b. Pidato “The Vaccine is Ideology”

Dalam pidato berikutnya, Kim Jong-un menegaskan, **“The only vaccine we needed was ideological consciousness and confidence in our own strength”** (KCNA Watch, 2022). Dalam pernyataan ini, metafora “vaksin” dialihkan dari konteks medis ke ranah ideologis, menggambarkan bahwa keselamatan nasional tidak bergantung pada imunisasi biologis, tetapi pada kesadaran ideologis dan kepercayaan diri kolektif rakyat. Secara linguistik, pernyataan ini merupakan bentuk *assertive speech act* yang mempertegas penolakan terhadap ketergantungan eksternal serta menunjukkan supremasi ideologi Juche di atas intervensi asing.

Pada level praktik wacana, pernyataan ini muncul di tengah tekanan internasional agar Korea Utara menerima bantuan vaksin dari luar negeri. Dengan menempatkan ideologi sebagai “vaksin sejati,” rezim menolak bantuan eksternal dan memperkuat citra kemandirian politik. Namun, pada level praktik sosial, pidato ini mengandung paradoks. Pilar *charip* (kemandirian ekonomi), yang seharusnya mendukung retorika tersebut, tidak terwujud dalam praktik. Sistem kesehatan Korea Utara masih menghadapi kekurangan obat, keterbatasan tenaga medis, dan infrastruktur yang lemah, sementara penolakan terhadap bantuan internasional memperparah kondisi pandemi. Oleh karena itu, *charip* dalam konteks ini hanya berfungsi secara simbolik dan ideologis, namun gagal secara material untuk menjamin kesejahteraan rakyat (KCNA Watch, 2022).

c. Pidato “Pandemic as War of Infiltration”

Dalam pidato ketiga yang berjudul “*Pandemic as War of Infiltration*”, Kim Jong-un menyatakan, “***It is not only a health issue but a war of infiltration against our ideology and people***” (KCNA Watch, 2022). Pernyataan ini mengandung metafora militeristik yang menafsirkan pandemi sebagai ancaman eksistensial, bukan sekadar krisis kesehatan. Melalui deklarasi ini, Kim Jong-un menempatkan COVID-19 dalam kerangka keamanan nasional, di mana perang melawan pandemi diidentikkan dengan perlindungan terhadap ideologi dan kedaulatan bangsa. Secara pragmatik, pernyataan tersebut termasuk dalam kategori *declarative speech act*, yang sekaligus berfungsi sebagai *directive act* implisit untuk memobilisasi rakyat dalam menghadapi ancaman yang didefinisikan oleh negara.

Pada tingkat praktik wacana, KCNA secara konsisten mengulang narasi bahwa pandemi adalah “perang” terhadap infiltrasi ideologis, menciptakan atmosfer krisis yang menjustifikasi disiplin kolektif dan kontrol sosial ketat. Dalam tataran praktik sosial, pidato ini menegaskan penerapan pilar *chawi* (kemandirian pertahanan), di mana ancaman eksternal dijadikan dasar legitimasi untuk memperluas wewenang aparat keamanan dan memperketat pengawasan terhadap warga. Strategi ini memperlihatkan efektivitas *chawi* sebagai alat sekuritisasi politik, meskipun secara empiris kebijakan tersebut justru berdampak negatif terhadap kesehatan publik dan memperdalam isolasi sosial (KCNA Watch, 2022).

Strategi retorika di atas merupakan bagian dari warisan politik Korea Utara yang menempatkan pemimpin sebagai figur moral tertinggi dan rakyat sebagai entitas yang harus dilindungi dari pengaruh eksternal. Dengan demikian, pidato Kim bukan sekadar komunikasi politik, melainkan tindak ujaran (*speech act*) yang memiliki kekuatan performatif. Kim tidak hanya

menggambarkan ancaman, tetapi juga menciptakan kondisi sosial dan politik di mana ancaman itu dianggap nyata (Wæver, 1995).

Dalam setiap pernyataannya, Kim Jong-un membingkai pandemi sebagai ujian terhadap loyalitas rakyat dan ketahanan ideologi Juche. Negara menggunakan wacana tersebut untuk memperkuat kontrol sosial dan legitimasi politik. Dengan menempatkan dirinya sebagai pelindung ideologi nasional, Kim Jong-un mengukuhkan posisinya sebagai aktor sekuritisasi utama (Myers, 2011).

D. Propaganda, Informasi, dan Reproduksi Ancaman

Kebijakan komunikasi dan propaganda negara memainkan peran penting dalam memperkuat proses sekuritisasi di Korea Utara. Negara secara sistematis mengontrol arus informasi untuk memastikan keseragaman makna dan mencegah masuknya wacana alternatif. Dalam konteks pandemi, tindakan ini diperluas untuk mengisolasi rakyat dari berita global dan memperkuat narasi bahwa Korea Utara adalah “benteng terakhir kemurnian ideologis” (Lankov, 2009).

Propaganda Korea Utara tidak hanya berfungsi untuk memuliakan pemimpin, tetapi juga untuk membangun identitas nasional yang berlandaskan pada gagasan rasial dan moral. Dalam konteks pandemi, konstruksi ini digunakan untuk menegaskan superioritas moral rakyat Korea Utara dibandingkan dengan dunia luar yang digambarkan sebagai terkontaminasi (Myers, 2011). Melalui narasi seperti ini, pandemi dijadikan alat untuk memperkuat identitas kolektif dan rasa solidaritas ideologis.

Selain itu, sistem komunikasi politik Korea Utara dirancang agar setiap wacana ancaman selalu dikaitkan dengan legitimasi ideologi Juche. Pandemi COVID-19 menjadi simbol dari “serangan biologis asing,” dan tindakan

isolasionis yang ekstrem diposisikan sebagai manifestasi dari prinsip self-reliance yang telah lama tertanam dalam politik nasional (Armstrong, 2003). Laporan North Korea Chronology (2017) juga mencatat bahwa pemerintah secara terbuka menolak bantuan medis asing dengan menyatakan “the people’s confidence in Juche is the strongest vaccine against any virus,” yang memperlihatkan bagaimana narasi ideologis menggantikan solusi medis (North Korea Chronology, 2017).

Dengan mengontrol informasi dan makna, negara memastikan bahwa rakyat tidak hanya mematuhi kebijakan, tetapi juga mempercayai narasi bahwa ketaatan terhadap negara adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Dalam hal ini, kontrol informasi menjadi alat sekuritisasi yang berfungsi tidak hanya untuk mencegah ancaman, tetapi juga untuk membentuk persepsi tentang ancaman itu sendiri (Myers, 2011).

E. Sekuritisasi sebagai Strategi Ketahanan Rezim (*Authoritarian Resilience*)

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa proses sekuritisasi pandemi COVID-19 di Korea Utara tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan, tetapi juga sebagai strategi untuk memperkuat ketahanan rezim otoriter (*authoritarian resilience*). Dalam konteks Asia, isu-isu keamanan non-tradisional seperti pandemi atau krisis ekonomi sering kali dimanfaatkan oleh rezim otoriter untuk memperkuat legitimasi kekuasaan (Caballero-Anthony et al., 2016).

Dalam kasus Korea Utara, pemerintah mengubah krisis kesehatan global menjadi alat untuk mempertegas otoritas politik dan memperkuat kontrol sosial. Negara berupaya mempertahankan stabilitas internal melalui kombinasi antara ketakutan dan nasionalisme. Dengan menjadikan pandemi sebagai ancaman terhadap ideologi, rezim memperoleh pembenaran moral

untuk melakukan tindakan ekstrem, seperti penutupan total perbatasan dan pengetatan pengawasan terhadap warga (Fifield, 2019).

Laporan North Korea Chronology (2017) juga menunjukkan bagaimana rezim menggambarkan pandemi sebagai “*a war against infiltration and ideological decay*,” sehingga pengetatan kebijakan keamanan dan pengawasan terhadap rakyat dibingkai sebagai bentuk perlindungan ideologi nasional (North Korea Chronology, 2017). Tindakan sekuritisasi ini memungkinkan rezim untuk meneguhkan hubungan simbolik antara pemimpin, rakyat, dan ideologi.

Dalam kerangka Copenhagen School, sekuritisasi yang dilakukan oleh Kim Jong-un bersifat vertikal yang dimana wacana ancaman tidak dinegosiasikan secara publik, tetapi dipaksakan melalui struktur kekuasaan yang tersentralisasi. Di Korea Utara, penerimaan audiens terhadap wacana ancaman diperoleh bukan melalui persuasi, melainkan melalui kontrol ideologis dan represi politik (Buzan et al., 1998). Dengan demikian, sekuritisasi pandemi COVID-19 berfungsi ganda: pertama, sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas politik dan ideologis; kedua, sebagai mekanisme legitimasi bagi otoritas Kim Jong-un di tengah tekanan internasional. Proses ini memperlihatkan bahwa Juche tidak hanya berperan sebagai doktrin politik, tetapi juga sebagai discursive weapon yang efektif dalam mempertahankan kelangsungan rezim (Cathcart, Green, & Denney, 2021).

F. Sintesis ideologi, wacana, dan kekuasaan

Dari keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa sekuritisasi Korea Utara selama pandemi COVID-19 merupakan hasil dari interaksi antara ideologi, wacana, dan kekuasaan. Ideologi Juche memberikan dasar normatif bagi negara untuk mengonversi krisis kesehatan menjadi krisis ideologis,

sementara kontrol wacana memungkinkan rezim memonopoli makna ancaman (Fifield, 2019).

Proses ini memperlihatkan bagaimana keamanan dan ideologi saling memperkuat dalam konteks negara otoriter. Dengan menggunakan bahasa sekuritisasi, Kim Jong-un tidak hanya mempertahankan stabilitas domestik, tetapi juga mengonstruksi ulang legitimasi politiknya di tengah tekanan global. Oleh karena itu, sekuritisasi di Korea Utara dapat dipahami sebagai bentuk “pertahanan ideologis” yang menjadikan krisis global sebagai peluang untuk memperkuat ketahanan rezim (Cathcart, Green, & Denney, 2021).

Proses sekuritisasi tersebut memperlihatkan bahwa Korea Utara mengintegrasikan pendekatan keamanan tradisional dan non-tradisional ke dalam satu sistem yang berorientasi pada perlindungan ideologi. Dalam konteks ini, ancaman biologis seperti COVID-19 diperlakukan sejajar dengan ancaman militer karena keduanya dianggap berpotensi menggoyahkan stabilitas rezim. Oleh karena itu, kebijakan isolasionis dan kontrol ketat terhadap informasi bukan hanya respons terhadap pandemi, tetapi juga bagian dari mekanisme pertahanan ideologis yang berakar pada prinsip Juche (Cathcart, Green, & Denney, 2021).

Dari perspektif teoretis, penelitian ini memperluas penerapan model sekuritisasi Copenhagen School ke dalam konteks Asia Timur, khususnya negara otoriter yang menggunakan ideologi sebagai *referent object*. Dalam kerangka ini, sekuritisasi tidak lagi dipahami semata sebagai tindakan politik terhadap ancaman militer, melainkan sebagai proses diskursif yang berakar pada nilai-nilai ideologis dan simbolik (Caballero-Anthony et al., 2016). Temuan ini sejalan dengan pandangan Mely Caballero-Anthony dan Ralf Emmers yang menekankan bahwa keamanan non-tradisional di Asia memiliki dimensi sosial, ideologis, dan kultural yang berbeda dari konteks Barat.

Lebih lanjut, penelitian ini juga berkontribusi pada pemahaman tentang ketahanan rezim otoriter (*authoritarian resilience*). Melalui sekuritisasi ideologi, Korea Utara berhasil mempertahankan stabilitas politik di tengah krisis global dengan memobilisasi rakyat atas dasar loyalitas ideologis. Rezim Kim Jong-un menunjukkan kemampuan adaptif yang tinggi dalam mengubah ancaman eksternal menjadi peluang internal untuk memperkuat legitimasi kekuasaan. Dengan demikian, pandemi tidak hanya dipandang sebagai tantangan, tetapi juga sebagai instrumen politik untuk memperbarui kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat (Myers, 2011; North Korea Chronology, 2017).

Secara praktis, temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan multidimensional dalam studi keamanan internasional, terutama dalam menganalisis negara-negara dengan sistem politik tertutup. Studi ini menunjukkan bahwa ancaman non-tradisional seperti pandemi dapat bertransformasi menjadi ancaman eksistensial apabila dilekatkan dengan nilai-nilai ideologi nasional. Dengan demikian, keamanan tidak dapat dipahami semata-mata dalam kerangka material, tetapi harus dilihat sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi (Fairclough, 1995).

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses sekuritisasi di Korea Utara selama pandemi COVID-19 tidak dapat dilepaskan dari peran ideologi Juche sebagai fondasi utama pembentukan kebijakan dan identitas nasional. Ideologi Juche, dengan tiga pilarnya yaitu chaju (kemandirian politik), charip (kemandirian ekonomi), dan chawi (kemandirian pertahanan) telah menciptakan kerangka pemikiran yang memungkinkan negara untuk mengonversi ancaman non-tradisional menjadi ancaman eksistensial

terhadap ideologi dan kedaulatan nasional. Dengan demikian, sekuritisasi dalam konteks Korea Utara bukan hanya proses politik, tetapi juga proses ideologis yang berfungsi untuk mempertahankan integritas rezim (Armstrong, 2003; Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998).

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kim Jong-un bertindak sebagai aktor sekuritisasi utama, menggunakan tindak ujaran (*speech act*) melalui pidato-pidato resmi yang disebar oleh KCNA untuk membingkai pandemi sebagai “perang ideologis” melawan infiltrasi asing. Wacana ini menempatkan rakyat sebagai bagian dari “benteng ideologi” dan menjustifikasi tindakan luar biasa seperti penutupan perbatasan, pengawasan sosial, serta penolakan terhadap bantuan vaksin internasional. Pandemi yang seharusnya menjadi isu kesehatan publik berubah menjadi arena legitimasi politik dan ideologis yang memperkuat kedaulatan simbolik negara (KCNA Watch, 2022; Fifield, 2019).

Sebagai penutup, penelitian ini memperlihatkan bahwa ideologi Juche berfungsi sebagai fondasi utama sekuritisasi Korea Utara selama pandemi COVID-19, di mana negara menggunakan krisis global untuk memperkuat legitimasi politik dan mempertahankan kedaulatan ideologisnya. Dalam kerangka hubungan internasional, fenomena ini memperluas batas pemahaman mengenai sekuritisasi non-tradisional dan memperlihatkan bagaimana ideologi dapat berperan sebagai instrumen pertahanan sekaligus alat kontrol sosial di negara otoriter (Cathcart, Green, & Denney, 2021).

Referensi

Buku :

Austin, J. L. (1962). *How To Do Things With Words*. Harvard University Press.

- Buzan, B. (1983). *People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations*. John Spiers.
- Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. de. (1998). *SECURITY A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner Publishers, Inc.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (Vol. 26, Issue 5). Longman Publishing.
- Fairclough, N. (1992). *Discourse and Sosial Change*.
- Fifield, A. (2019). *The Great Successor* (Vol. 1).
- Myers, B. R. (1963). *The Cleanest Race: How North Koreans See Themselves And Why It Matters* (Vol. 17).
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*.
- Park, K.-A. (2013). *Non-Traditional Security Issues In North Korea* (K.-A. Park (Ed.)). University of Hawai'i Press.
- Wæver, O. (1995). *Securitization and Desecuritization* (R. D. Lipschutz (Ed.); pp. 46–87). Columbia University Press.

Jurnal :

- Abrahamian, A., & Melvin, C. (2015). North Korea ' s Special Economic Zones : Plans vs . Progress. *38 North Korea*, 1–18.
- Armah, & Halimah. (2024). Kemandirian Kepemimpinan Kim Jong Un: Analisis Kebijakan-kebijakan Strategis Dalam Menguatkan Negara Korea Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 05(02), 1–12.
- Armstrong, C. K. (2003). The Cultural Cold War in Korea, 1945–1950. *The Journal of Asian Studies*, 62(1), 71–99.
- Armstrong, C. K. (2013). Tyranny of the Weak. In *Tyranny of the Weak*. Cornell University.
- Cabllero-Anthony, M., D.B Cook, A., S. Hadiwinata, B., Jackson Ewing, J., Teng, P., Lassa, J., Zha, D., Dubois King, M., Rushton, S., Curley, M., & Capie, D. (2016). *An Introduction to Non-Traditional Security Studies: A Transnational Approach* (Amy Jarrold (ed.); 1st ed.). SAGE Publications Ltd.
- Cathcart, A., Green, C., & Denney, S. (2022). Decoding the Sino-North Korean Borderlands. *Journal of Korean Studies*, 27(2), 384–389.

- Dhawan, R. K. (2024). The Geopolitics of North Korea's Juche Ideology under Kim Jong-un. *MP-IDSA*, 1–9.
- Lankov, A. (2009). Changing North Korea: An information campaign can beat the regime. *Foreign Affairs*, 88(6), 95–105.
- Lee, G. (2003). The Political Philosophy of Juche. *Stanford Journal of East Asian Affairs*, 3(1), 105–112.
- Schulten, E. (2023). In the World. *Kenyon Review*, 45(3), 135–136.
- Social Science Research Council. (2017). North Korea Chronology 2017. *Northeast Asia Cooperative Security Project*, 1–131.

Artikel :

- KBS World Radio. (2020). 'Juche(Self-Reliance)' Ideology. *Korean Peninsula A to Z*:
https://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/supreme_leader/ideology.htm?lang=e
- KCNA Watch. (2022, August 12). Kim Jong-un makes speech at National Meeting of Reviewing Emergency Anti-epidemic Work. From KCNA Watch: <https://kcnawatch.org/newstream/1660302331-237309177/kim-jong-un-makes-speech-at-national-meeting-of-reviewing-emergency-anti-epidemic-work/>